

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Wonosari untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Wonosari. Dalam penyusunannya, Renstra Kapanewon Wonosari berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga Kapanewon Wonosari harus mampu untuk menterjemahkan visi, misi serta agenda RPJMD berikut strategi, kebijakan, dan capaian program dalam RPJMD. Renstra Kapanewon Wonosari selanjutnya dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcomes*) perlu adanya sinkronisasi antara program dan kegiatan yang berfokus pada program prioritas guna mendukung pencapaian kinerja.

Keterkaitan Renstra Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya

a. Keterkaitan Renstra Kapanewon Wonosari dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul

Dalam penyusunannya Renstra Kapanewon Wonosari berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan:

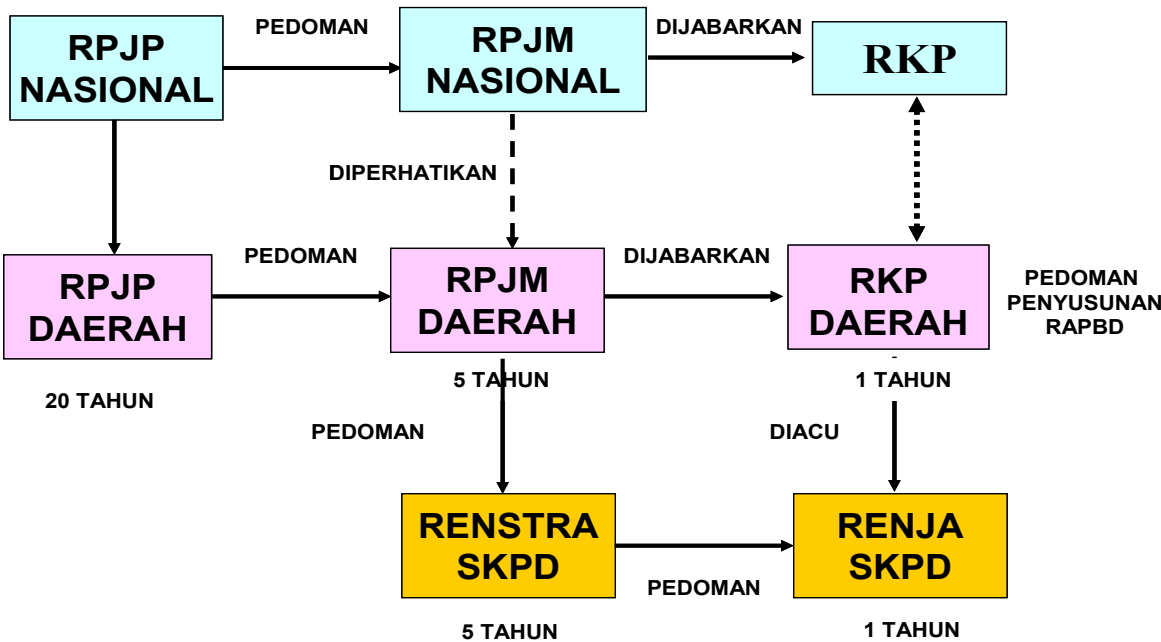
- 1) Renstra Kapanewon Wonosari sebagai dokumen teknis yang merupakan penjabaran RPJMD
- 2) Renstra Kapanewon Wonosari memuat arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan atau

fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh SKPD dan berkoordinasi dengan Bappeda

b. Keterkaitan Renstra Kapanewon Wonosari dengan Renja Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul

Renstra Kapanewon Wonosari digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Wonosari yang nantinya akan digunakan sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan Kapanewon Wonosari pada setiap Tahun Anggaran.

Kaitan RENSTRA PD dengan Dokumen Perencanaan Lain:



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Kapanewon Wonosari Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3); 10.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kapanewon Wonosari Tahun 2025-2029 adalah :

1. Sebagai penjabaran tujuan dan sasaran dan misi Kapanewon Wonosari Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun yang akan datang dalam rangka mendukung pelaksanaan visi, misi dan program Kepala Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam melakukan tindakan dan kebijakan yang akan diambil, terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
3. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi seluruh stakeholder di Kapanewon Wonosari dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Tujuan penyusunan Renstra antara lain :

1. Memberikan pedoman dan arah bagi setiap elemen dalam tubuh Kapanewon Wonosari dalam mewujudkan visi dan misi serta program yang telah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran serta Program Kepala Daerah;
2. Koordinasi antar aparat pengawasan melalui penyusunan rencana kerja dalam menjalankan fungsi pengawasan internal;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian antara dokumen 5 tahunan dengan dokumen 1 tahun.
4. Sebagai instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pengawasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kapanewon Wonosari Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Wonosari

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kapanewon Wonosari ;
- 2.1.2 Sumber Daya Kapanewon Wonosari ;
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Wonosari ;
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Wonosari

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Wonosari ;

2.2.2 Isu Strategis Kapanewon Wonosari;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;

3.2 Sasaran Rencana Strategis Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;

3.3 Strategi Kapanewon Wonosari dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029; dan

3.4 Arah Kebijakan Kapanewon Wonosari dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN
ISU STRATEGIS KAPANEWON WONOSARI

2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Wonosari

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Wonosari merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon terdiri dari:

- a. Unsur pimpinan : Panewu
- b. Unsur pembantu pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian
- c. Unsur pelaksana : Jawatan – jawatan
- d. Kelompok jabatan fungsional

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat Daerah

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugasnya Kapanewon mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

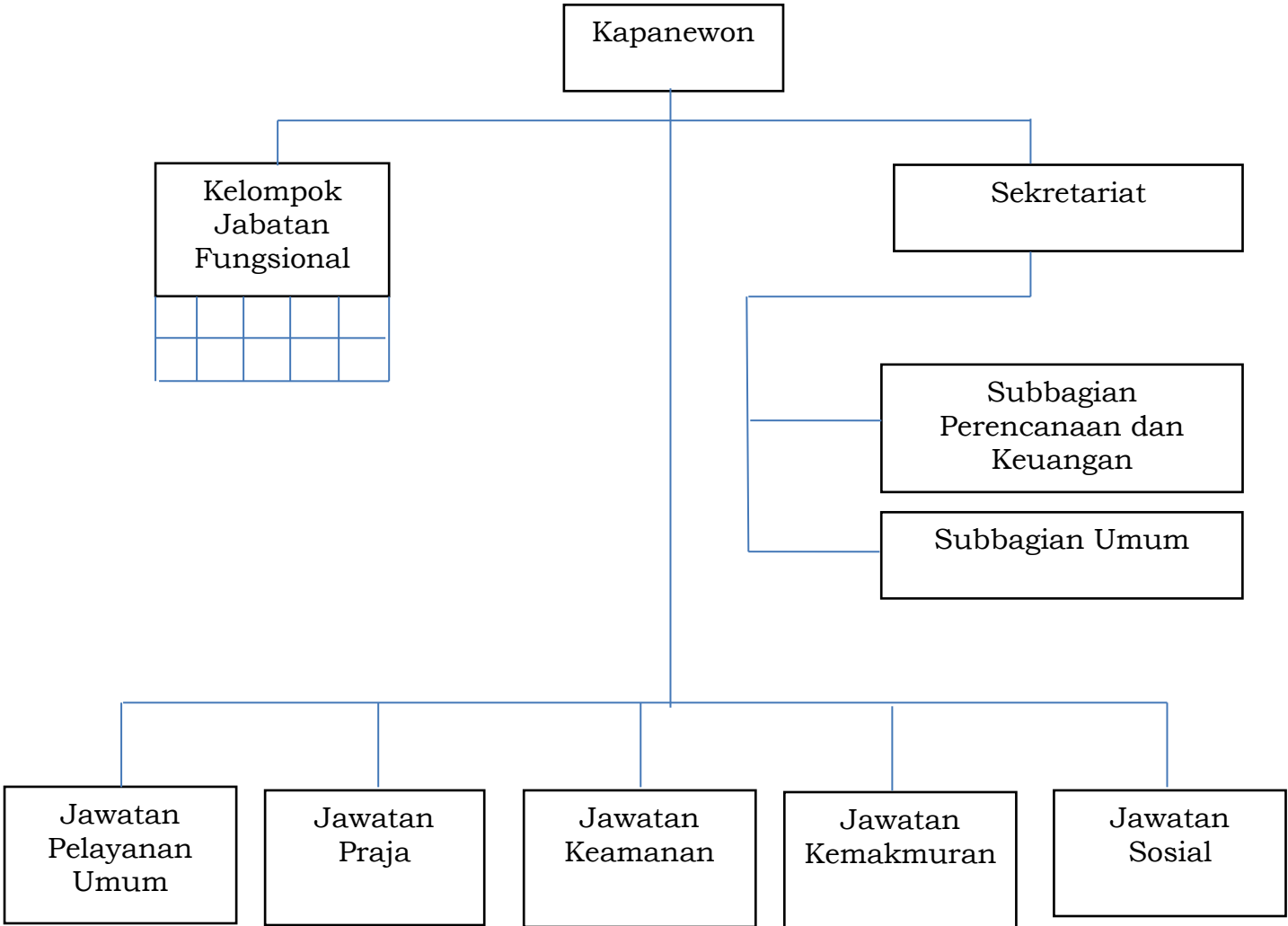
Adapun struktur organisasi kapanewon terdiri dari:

- a. Panewu
- b. Sekretriati yang membawahi:
 - 1. Subbagian perencanaan dan keuangan
 - 2. Subbagian umum
- c. Jawatan Praja
- d. Jawatan Keamanan
- e. Jawatan Kemakmuran
- f. Jawatan Sosial

- g. Jawatan Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi kapanewon Wonosari sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kapanewon



Sumber: Kapanewon Wonosari, 2025

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi kapanewon, didukung sumberdaya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 22 orang pada akhir tahun 2024 yang terdiri dari 18 PNS, 1 PPPK dan 3 Tenaga Harian Lepas (THL). Adapun jabatan struktural di lingkungan Kapanewon Wonosari sebanyak 9 jabatan, terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan (definitif), eselon IV.a = 5 jabatan, dan eselon IV.b = 2 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai non eselon sebanyak 11 orang. Dukungan sumber daya manusia pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan	
1	2	3	4				5	6				7	8	
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
1	Unsur Pimpinan													
	Panewu	1		1			1		1				1	
2	Unsur Pembantu Pimpinan													
	Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian	22		9	1	12	7	1	3	2	1		5	1
3	Unsur Pelaksana													
	Jawatan-jawatan;	28		11		17	10		10				10	
4	Kelompok Jabatan Fungsional													
	Jumlah	51		21	1	29								

Sumber: Data Kepegawaian Kapanewon Wonosari per 31 Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel 2.2, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 13 orang (67,48%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 2 orang (11,1%), S2 sebanyak 1 orang (7.14%), D3 sebanyak 1 orang (7.14%), dan SMP Sebanyak 1 orang (7.14%),. Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Namun, keberadaan pegawai perempuan, bahkan 1 orang diantaranya menduduki jabatan struktural, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel 2.3
Jumlah PNS Kapanewon Wonosari
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jabatan

No.	Nama Instansi	Jumlah PNS	Golongan Ruang															
			I				II				III				IV			
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1.	Panewu	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Panewu Anom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3.	Jawatan Praja	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
4.	Jawatan Keamanan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
5.	Jawatan sosial	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
6.	Jawatan Kemakmuran	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
7.	Jawatan Pelayanan umum	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
8.	Subbag Perencanaan dan Keuangan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
9.	Subbagian Umum	5	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah		19	-	-	-	-	1	-	-	1	8	2	-	5	1	-	-	-

Kapanewon Wonosari terus berupaya melaksanakan upaya penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana, peralatan dan perlengkapan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja. Dukungan sarana-prasarana Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi aula, ruang arsip, dan mushola.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik. Akan tetapi sampai saat ini Kapanewon Wonosari belum memiliki fasilitas ruang laktasi untuk ibu menyusui dan belum menjadi kawasan bebas rokok.

Adapun fasilitas yang sudah dimiliki Kapanewon Wonosari antara lain:

- a. Bangunan ramah disabilitas
- Kantor Kapanewon Wonosari telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
- pintu masuk yang mudah diakses
 - toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas

- Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan
- b. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- c. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
- d. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

Tabel 2.4 Sarana – Prasarana

NO.	Jenis Aset Tetap	Saldo Akhir Aset per 30 Desember 2024
1	2	4
	ALAT ANGKUTAN	309.988.200,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	556.206.608,24
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	25.731.000,00
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	485.000,00
	ALAT LABORATORIUM	784.000,00
	KOMPUTER	279.376.087,00
	BANGUNAN GEDUNG	4.251.727.500,00
	INSTALASI	146.730.000,00
	JARINGAN	376.046.000,00
	T O T A L	5.947.065.395,24

Sumber: Laporan Keuangan Kapanewon Wonosari Tahun 2024

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2024

Dalam melaksanakan pencatatan, inventarisasi, dan revaluasi aset harus ada strategi manajemen aset agar koordinasi antara program dan pelaksanaan dapat terkoordinasi dengan baik. Istilah *Strategic Asset Management* atau SAM digunakan untuk menggambarkan sebuah siklus pengelolaan aset, yaitu mulai dari proses perencanaan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban pelaporan aset. Keberhasilan SAM sering kali dikaitkan dengan keberhasilan menghemat anggaran sebagai dampak dari keberhasilan mengintegrasikan proses perencanaan dan pengelolaan aset. Pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Kapanewon Wonosari dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, berkenaan adanya kewajiban kepala daerah untuk membuat pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dalam bentuk neraca daerah, yaitu suatu laporan yang menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu yang terdiri atas aset, hutang, dan ekuitas. Untuk mengetahui kondisi Aset daerah yang dikelola oleh Kapanewon Wonosari kami sajikan dalam lampiran.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai salah satu Perangkat daerah, Kapanewon Wonosari mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul. Dalam melaksanakan tugasnya Kapanewon Wonosari harus mampu menterjemahkan visi, misi, pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam rencana strategis kapanewon. Mendasar kepada rencana strategis yang telah ditetapkan dan didukung dengan sumberdaya yang ada, tugas-tugas yang dibebankan kepada Kapanewon Wonosari dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam perkembangannya tugas-tugas yang diemban Kapanewon Wonosari dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai secara optimal. Permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kondisi sumber daya yang dimiliki. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tugas-tugas masih kurang optimal.

Disisi lain keberhasilan dalam pelaksanaan tugas disebabkan karena adanya sistem yang dibangun oleh Kapanewon Wonosari, diantaranya terciptanya koordinasi yang lintas sektoral (UPT, pemerintah kalurahan, dan Dinas Instansi/Muspika), masih kentalnya jiwa gotong-royong, adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi, tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas, serta terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas layanan.

Secara garis besar keberhasilan pencapaian realisasi kinerja dipengaruhi faktor-faktor antara lain penyerapan anggaran yang cukup maksimal, penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, dan adanya kerja sama dari semua pihak baik dari kapanewon, kalurahan, dan lembaga terkait dengan melakukan koordinasi dan monitoring secara berkala serta perencanaan dan penganggaran sudah sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Kinerja Pelayanan Kapanewon Wonosari Tahun 2022 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Dari tiga indikator hasilnya masih ada yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan adanya keterbatasan SDM yang ada.
2. Untuk anggaran Kapanewon Wonosari dari tahun ke tahun ada yang mengalami kenaikan maupun penurunan anggaran dikarenakan adanya sebuah kebijakan, sedangkan untuk realisasi anggaran setiap tahunnya sebagian tidak terealisasi 100 % dikarenakan ada beberapa rekening yang realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan (misalnya listrik dan air).

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Wonosari
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	-	-	-	84,61	80,08	84,67	84,70	84,61	80,08	84,67	-	100,00	100,00	100,00	-
2	Nilai AKIP PD	-	-	-	80,03	80,08	81,01	81,04	80,03	80,08	81,01	-	100,00	100,00	100,00	-
3	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	-	100,00	100,00	100,00	-

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Wonosari
Kabupaten Gunungkidul

No	Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata -Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	133.750.000	100.000.000	100.000.000	30.000.000	-	132.750.000	100.000.000	100.000.000	0	0	99,25	100,00	100,00	0,00	0,00	(33.437.500)	-24,81308
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	133.750.000	100.000.000	100.000.000	30.000.000	-	132.750.000	100.000.000	100.000.000	0	0	99,25	100,00	100,00	0,00	0,00	(33.437.500)	-24,81308
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	133.750.000	100.000.000	100.000.000	30.000.000		132.750.000	100.000.000	100.000.000			99,25	100,00	100,00	0,00	0,00	(33.437.500)	-24,81308
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	25.970.000	35.000.000	119.895.000	33.890.000	0	25.970.000	34.349.900	119.895.000	0	0	100,00	98,14	100,00	0,00	0,00	(6.492.500)	-25
4.01.04.2.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	25.970.000	35.000.000	119.895.000	33.890.000	0	25.970.000	34.349.900	119.895.000	0	0	100,00	98,14	100,00	0,00	0,00	(6.492.500)	-25
4.01.04.2.01.07	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan	25.970.000	35.000.000	119.895.000	33.890.000		25.970.000	34.349.900				100,00	98,14	0,00	0,00	0,00	(6.492.500)	-25
4.01.04.2.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	25.970.000	35.000.000	119.895.000	33.890.000		25.970.000	34.349.900	119.895.000			100,00	98,14	100,00	0,00	0,00	(6.492.500)	-25
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.385.167.420	1.279.614.367	1.473.794.520	1.624.034.750	-	2.301.527.893	1.276.495.632	1.453.621.451	0	0	96,49	99,76	98,63	0,00	0,00	(596.291.855)	-24,12334
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.700.000	11.099.900	7.355.000	14.303.000	-	5.700.000	11.099.900	7.355.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(1.425.000)	-25
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.200.000	3.145.000	3.170.000	4.050.000		3.200.000	3.145.000	3.170.000	-	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(800.000)	-25
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	200.000	1.295.000	990.000	1.445.000		200.000	1.295.000	990.000	-		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(50.000)	-25
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	200.000	1.165.000	375.000	1.615.000		200.000	1.165.000	375.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(50.000)	-25
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	600.000	1.525.000	400.000	1.525.000		600.000	1.525.000	400.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(150.000)	-25
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	400.000	1.159.900	300.000	1.159.000		400.000	1.159.900	300.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(100.000)	-25
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.110.000	1.120.000	2.509.000			1.110.000	1.120.000				100,00	100,00	0,00	0,00	-	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.100.000	1.700.000	1.000.000	2.000.000		1.100.000	1.700.000	1.000.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(275.000)	-25
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.776.159.078	1.035.612.567	1.268.042.470	1.327.665.110	-	1.694.156.561	1.033.586.940	1.258.395.269	0	0	95,38	99,80	99,24	0,00	0,00	(444.039.770)	-23,84579
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.771.659.078	1.030.822.567	1.262.642.470	1.320.905.110		1.689.656.561	1.028.796.940	1.252.995.269			95,37	99,80	99,24	0,00	0,00	(442.914.770)	-23,84286
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.410.000	500.000	1.760.000		1.000.000	1.410.000	500.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(250.000)	-25
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.500.000	3.380.000	4.900.000	5.000.000		3.500.000	3.380.000	4.900.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(875.000)	-25
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.025.000	6.510.000	5.250.900	6.131.900	-	2.025.000	6.510.000	4.248.288	0	0	100,00	100,00	80,91	0,00	0,00	(506.250)	-25
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.025.000	6.510.000	5.250.900	6.131.900		2.025.000	6.510.000	4.248.288			100,00	100,00	80,91	0,00	0,00	(506.250)	-25
7.01.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.241.000	45.198.800	23.995.500	39.682.500	-	37.176.000	45.198.800	23.995.500	0	0	99,83	100,00	100,00	0,00	0,00	(9.310.250)	-24,95637
7.01.01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi	2.750.000	2.999.000	2.264.500	3.497.500		2.750.000	2.999.000	2.264.500			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(687.500)	-25

No	Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata -Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
7.01.01.2.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.291.000	28.250.000	12.781.000	20.566.000		27.291.000	28.250.000	12.781.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(6.822.750)	-25
7.01.01.2.05.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.900.000	3.269.600	2.062.000	3.997.000		1.900.000	3.269.600	2.062.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(475.000)	-25
7.01.01.2.05.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.700.000	5.400.200	3.038.000	3.222.000		2.635.000	5.400.200	3.038.000			97,59	100,00	100,00	0,00	0,00	(675.000)	-24,39815
7.01.01.2.05.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(300.000)	-25
7.01.01.2.05.08	Fasilitas Kunjungan Tamu				2.100.000										0,00	0,00	-	0
7.01.01.2.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.400.000	4.080.000	2.650.000	5.100.000		1.400.000	4.080.000	2.650.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(350.000)	-25
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.550.000	14.090.000	6.500.000	38.150.000	-	37.550.000	14.090.000	6.400.000	0	0	100,00	100,00	98,46	0,00	0,00	(9.387.500)	-25
7.01.01.2.07.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.800.000	6.590.000	6.500.000	18.650.000		6.800.000	6.590.000	6.400.000									
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.750.000	7.500.000	0	19.500.000		30.750.000	7.500.000				100,00	100,00		0,00	0,00	(7.687.500)	-25
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.807.000	116.575.600	71.103.650	113.842.240	-	76.303.332	115.482.692	61.723.474	0	0	98,07	99,06	86,81	0,00	0,00	(19.451.750)	-24,51686
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.012.500	24.987.500	6.940.550	0		21.925.000	24.987.500	6.140.620			99,60	100,00	88,47		0,00	(5.503.125)	-24,90062
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.252.000	42.313.100	43.620.600	59.554.740		34.913.332	41.388.192	35.682.234			96,31	97,81	81,80	0,00	0,00	(9.063.000)	-24,07683
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.542.500	49.275.000	20.542.500	54.287.500		19.465.000	49.107.000	19.900.620			99,60	99,66	96,88	0,00	0,00	(4.885.625)	-24,90086
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.785.342	50.527.500	91.547.000	84.260.000	-	72.717.000	50.527.300	91.503.920	0	0	99,91	100,00	99,95	0,00	0,00	(18.196.336)	-24,97653
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.900.000	40.787.500	43.900.000	69.800.000		36.899.500	40.787.300	43.878.800			100,00	100,00	99,95	0,00	0,00	(9.225.000)	-24,99966
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	4.440.000	4.060.000	6.000.000		4.000.000	4.440.000	4.060.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(1.000.000)	-25
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.685.342	3.500.000	42.687.000	6.660.000		30.617.500	3.500.000	42.665.120			99,78	100,00	99,95	0,00	0,00	(7.671.336)	-24,94473
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.200.000	1.800.000	900.000	1.800.000		1.200.000	1.800.000	900.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(300.000)	-25
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	375.900.000	-	0	0	-	375.900.000	0	0	0	0	100,00				0,00	(93.975.000)	-25
7.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	375.900.000	0	0	0		375.900.000	0	0			100,00				0,00	(93.975.000)	-25
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	231.747.500	897.835.500	69.582.500	42.760.000	-	228.748.070	893.953.325	67.161.020	0	0	98,71	99,57	96,52	0,00	0,00	(57.936.875)	-24,67643
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	88.870.000	19.900.000	10.550.000	7.025.000	-	88.870.000	19.900.000	10.550.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(22.217.500)	-25
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	88.870.000	19.900.000	10.550.000	7.025.000		88.870.000	19.900.000	10.550.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(22.217.500)	-25
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	142.877.500	117.095.500	59.032.500	35.735.000	-	139.878.070	116.413.325	56.611.020	0	0	97,90	99,42	95,90	0,00	0,00	(35.719.375)	-24,47517
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	120.100.000	91.920.000	32.085.000	0		117.183.070	91.237.825	30.425.400			97,57	99,26	94,83		0,00	(30.025.000)	-24,39281
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.777.500	25.175.500	26.947.500	35.735.000		22.695.000	25.175.500	26.185.620			99,64	100,00	97,17	0,00	0,00	(5.694.375)	-24,90945
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	-	760.840.000	0	0	-	-	757.640.000	0	-	-		99,58			0,00	-	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan	-	760.840.000	0	0			757.640.000	0				99,58			0,00	-	0

No	Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata -Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
	lain yang dilimpahkan																	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	228.978.000	65.548.100	37.229.000	58.769.000	-	228.978.000	65.548.100	37.229.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(57.244.500)	-25
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.818.000	56.483.300	27.100.000	44.909.000	-	68.818.000	56.483.300	27.100.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(17.204.500)	-25
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	48.668.000			0		48.668.000					100,00				0,00	(12.167.000)	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan		21.508.500	20.100.000	35.879.000			21.508.500	20.100.000			#DIV/0!	100,00	100,00	0,00	0,00	-	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.150.000	34.974.800	7.000.000	9.030.000		20.150.000	34.974.800	7.000.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(5.037.500)	-25
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	160.160.000	9.064.800	10.129.000	13.860.000	-	160.160.000	9.064.800	10.129.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(40.040.000)	-25
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasarakatan	4.600.000	4.450.000	7.209.000	9.625.000		4.600.000	4.450.000	7.209.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(1.150.000)	-25
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	155.560.000	4.614.800	2.920.000	4.235.000		155.560.000	4.614.800	2.920.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(38.890.000)	-25
																	-	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.000.000	12.255.000	6.260.000	231.766.800	-	14.000.000	12.255.000	6.260.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(3.500.000)	-25
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.000.000	12.255.000	6.260.000	231.766.800	-	14.000.000	12.255.000	6.260.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(3.500.000)	-25
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	10.000.000	5.880.000	2.260.000	224.267.000		10.000.000	5.880.000	2.260.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(2.500.000)	-25
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.000.000	6.375.000	4.000.000	7.499.800		4.000.000	6.375.000	4.000.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(1.000.000)	-25
																0,00	-	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70.925.000	67.150.000	112.100.000	97.123.000	-	70.925.000	67.150.000	112.100.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(17.731.250)	-25
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	70.925.000	67.150.000	112.100.000	97.123.000	-	70.925.000	67.150.000	112.100.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(17.731.250)	-25
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	61.925.000	60.175.000	100.000.000	89.973.000		61.925.000	60.175.000	100.000.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(15.481.250)	-25
7.01.05.2.01.06	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.775.000	1.000.000			1.000.000	1.775.000	1.000.000									
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.000.000	5.200.000	11.100.000	7.150.000		8.000.000	5.200.000	11.100.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(2.000.000)	-25
																0,00	-	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	115.370.000	21.474.700	23.362.400	41.549.600	-	115.370.000	21.474.700	20.910.000	0	0	100,00	100,00	89,50	0,00	0,00	(28.842.500)	-25
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	115.370.000	21.474.700	23.362.400	41.549.600	-	115.370.000	21.474.700	20.910.000	0	0	100,00	100,00	89,50	0,00	0,00	(28.842.500)	-25
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.500.000	1.780.000	2.800.000	2.600.000		1.500.000	1.780.000	2.800.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(375.000)	-25
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.310.000	3.154.900	4.345.000	2.400.800		4.310.000	3.154.900	4.345.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(1.077.500)	-25
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	16.470.000	9.525.000	6.000.000	17.449.900		16.470.000	9.525.000	6.000.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(4.117.500)	-25

No	Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata -Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
	Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		1.275.000	5.702.400	2.999.800			1.275.000	3.250.000				100,00	56,99	0,00	0,00	-	0
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.000.000	1.219.800	2.500.000	1.500.100		1.000.000	1.219.800	2.500.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(250.000)	-25
7.01.06.2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.350.000					3.350.000											
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa				11.099.000										0,00	0,00	-	0
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	88.740.000	4.520.000	2.015.000	3.500.000		88.740.000	4.520.000	2.015.000			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	(22.185.000)	-25
		3.205.907.920	2.478.877.667	1.942.223.420	2.159.893.150	-	3.118.268.963	2.471.226.657	1.917.176.471	0	0							

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dibagi dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan (faktor internal) lebih mudah dibanding mengidentifikasi faktor eksternal terutama merumuskan ancaman.

Lingkungan internal terdiri dari kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi.

Kapanewon Wonosari sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Gunungkidul memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan merata. Untuk mewujudkan hal tersebut, penetapan kelompok sasaran pelayanan menjadi langkah strategis dalam menjamin efektivitas dan efisiensi program-program pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kapanewon.

Kelompok sasaran pelayanan di Kapanewon Wonosari mencakup berbagai lapisan masyarakat, dengan prioritas berdasarkan kebutuhan, karakteristik wilayah, serta kondisi sosial-ekonomi penduduk. Kelompok sasaran tersebut antara lain:

a. Masyarakat Umum

Seluruh warga yang berdomisili di wilayah Kapanewon Wonosari merupakan penerima manfaat utama dari layanan dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan, informasi publik, dan layanan umum lainnya.

b. Kelompok Rentan dan Marginal

Termasuk di dalamnya adalah lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah kapanewon memberikan perhatian dengan melakukan pendampingan seperti kegiatan pemberian bantuan sosial, layanan kesehatan, maupun pemberdayaan.

c. Petani dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Mengingat karakteristik wilayah yang mayoritas penduduknya di sektor pertanian, pelayanan yang ditujukan kepada petani

dan pelaku UMKM menjadi prioritas dalam upaya penguatan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas produksi, serta akses terhadap pasar dan permodalan.

d. Pemuda dan Pelajar

Sebagai generasi penerus, kelompok pemuda dan pelajar menjadi sasaran penting dalam program-program pembinaan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kapasitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan partisipatif.

e. Aparatur Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan

Sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kelompok ini memperoleh layanan dalam bentuk pembinaan, fasilitasi, serta peningkatan kompetensi agar mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan administrasi kependudukan di wilayah. Kapanewon berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan yang diberikan oleh operator dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi teknis yang memproses dan menerbitkan dokumen tersebut yang di tempatkan atau ditugaskan pada lingkup ruang pelayanan di Kapanewon Wonosari. Kerja sama ini mendorong terciptanya pelayanan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mendukung tertib administrasi kependudukan secara menyeluruh.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Wonosari

Kapanewon Wonosari merupakan salah satu dari 18 Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul dan terletak di Ibukota Kabupaten. Dalam rangka mempercepat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Wonosari memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kapanewon Wonosari dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan

untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Berikut permasalahan dan faktor penyebabnya disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.7
Permasalahan dan Faktor Penyebabnya

No	Permasalahan	Penyebab Permasalahan
1	Pemahaman dan pengendalian SOP pelayanan di kalurahan-kalurahan belum optimal	Masih ada permohonan yang persyaratannya belum lengkap
2	Adanya perubahan regulasi/peraturan	Akan mempengaruhi proses perencanaan di Kapanewon dan kalurahan, pekerjaan dapat terselesaikan tetapi tidak tepat waktu
3	Adanya kewenangan yang sudah dilimpahkan ke Kapanewon tetapi belum dapat dilaksanakan	Belum ada pelatihan untuk sumber daya manusia dan belum ada sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi ada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu Strategis mempunyai karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon, jika pengelolaan dilakukan secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan di kapanewon.

Tabel 2.8
Isu Strategis Kapanewon Wonosari

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	Good Governance	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon
	Kapasitas SDM kurang memadai					
	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai					

Isu KLHS yang relevan dengan Kapanewon Wonosari berdasarkan dokumen KLHS adalah : Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik. Dari isu KLHS tersebut kemudian dalam penetapan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2030 yang didasarkan hasil dari Konsultasi Publik dan keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul dan isu strategis dokumen lainnya yang di bagi menjadi 4 pilar 17 isu strategis, maka berdasarkan Isu KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang relevan dengan Kapanewon Wonosari adalah Pilar ke- empat yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola yang terdiri dari 3 isu yaitu :

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan public masih rendah
3. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah "Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".

Adapun penjelasan Visi adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat Adil Makmur: Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat; melaksanakan hak-hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Masyarakat Lestari: Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.
- c. Masyarakat Berkeadaban: Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 yang meliputi:

- a. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri
- b. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani
- c. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif
- d. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal
- e. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban
- f. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur Bangsa Indonesia.

Dari visi dan misi tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan tugas dan fungsi kapanewon serta mendasar pada hasil identifikasi permasalahan sebagaimana pada bab selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Wonosari mendasar pada Misi Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

3.1 Tujuan Renstra Kapanewon Wonosari

Tujuan renstra PD tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin di wujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan norma, standar, prosedur dan kinerja (NSPK) dengan memperhatikan sasaran RPJMD.

Tujuan daerah:

Terwujudnya tata kelola dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan tujuan daerah tersebut di atas maka tujuan Kapanewon Wonosari:

Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas.

3.2 Sasaran Renstra Kapanewon Wonosari

Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju tercapainya tujuan renstra PD.

Sasaran berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Wonosari mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kapanewon Wonosari											
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)	93,82	96,78	96,88	96,98	97,08	97,18	97,28	
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kesejahteraan sosial	Persentase Kegiatan Sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	83,38	83,88	84,38	84,88	85,38	85,88	86,38	

3.3 Strategi Kapanewon Wonosari dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra Kapanewon Wonosari tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Adapun langkah-langkah perumusan strategi adalah :

- a. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- b. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
- c. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah paling tepat
- d. Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran ke dalam berbagai tabel.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai daerah. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap untuk penyusunan dokumen Renstra. Tahap pertama adalah tahap sesuai dengan tahapan RPJPD dan RPJMD yaitu tahapan penguatan fondasi. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan tahunan maka Kapanewon Wonosari melakukan pentahapan Renstra seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas ekonomi berdasarkan potensi daerah yang lestari menuju kesejahteraan masyarakat	Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas yang lestari menuju kesejahteraan masyarakat	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas yang lestari menuju kesejahteraan masyarakat	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas yang lestari menuju kesejahteraan masyarakat	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas yang lestari menuju kesejahteraan masyarakat

3.4 Arah Kebijakan Kapanewon Wonosari Dalam Mencapaian tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Wonosari Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Kapanewon Wonosari dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Wonosari

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapaneown	
		Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Memperkuat fungsi kelembagaan , peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kapanewon Wonosari dalam lima tahun mendatang dituangkan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

ISU STRATEGIS		Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	
Visi		Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban	
Misi		Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon
	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon
	Meningkatnya Kesejahteraan sosial		

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu Kapanewon Wonosari dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan prioritas. Selain dari APBD Kabupaten juga bersumber dari Dana Keistimewaan DIY (Dais) dan Dana Desa. Dais adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer ke Daerah yang bisa jadi tidak setiap tahun mendapatkan anggaran tersebut. Dana ini dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun langkah-langkah perumusan rencana program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

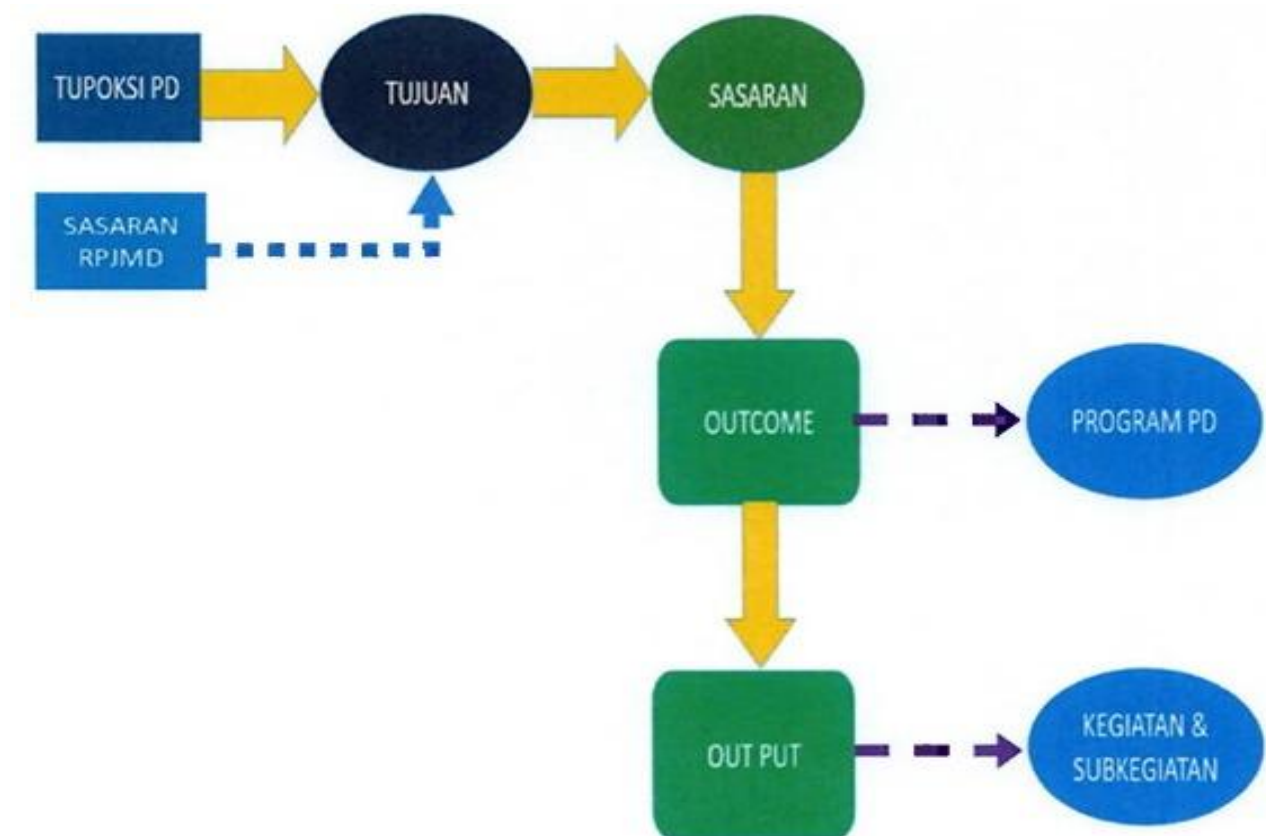
1. Memperhatikan indikator program dan pagu per PD.
2. Merumuskan target outcome program PD untuk mencapai sasaran pembangunan
3. Melakukan perumusan target output/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target outcome program PD
4. Melakukan perumusan kegiatan
5. Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan
6. Menghitung biaya program untuk mencapai target outcome
7. Memeriksa apakah total biaya program sesuai dengan pagu PD. Jika melebihi pagu PD, lakukan prioritas program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu PD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang akan dibahas dalam forum PD penyusunan Renstra PD
8. Menyusun rincian target outcome program ke dalam target tahunan

9. Berdasarkan target outcome tahunan, susun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program per tahun.

Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan merupakan penjabaran dari program dan kegiatan dalam RPJMD. Program kegiatan, dan subkegiatan Renstra Kapanewon Wonosari tahun 2025-2029 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD). Matrik Renstra dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Terutama tahun 2030 yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD tahun 2030.

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Sumber : Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Program yang diambil oleh Kapanewon Wonosari antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan ketatalaksanaan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6. Program Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum.
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Kapanewon Wonosari dinyatakan secara eksplisit sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kapanewon Wonosari

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kapanewon Wonosari							
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Terlaksananya penyelenggaraan Keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan di kapanewon wonosari	Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)		
					Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
		Meningkatnya Fasilitasi Perencanaan Partisipatif,			Persentase desa/ kalurahan yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas dan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Penguatan Kapasitas, dan Produktifitaas Ekonomi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan		pengembangan ekonomi masyarakat (%)		
				Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya kesejahteraan sosial			Persentase Kegiatan Sosial (%)		
			Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di kapanewon wonosari		Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Adat, Tradisi, Seni, dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya Fasilitasi Perencanaan Partisipatif, Penguatan Kapasitas, dan Produktifitaas Ekonomi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa		Persentase desa/ kalurahan yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			dan Kelurahan				
			Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan dan Layanan Sosial di Masyarakat Kelurahan		Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Kegiatan Pemberdayaan dan Layanan Sosial di Kalurahan yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan Kegiatan Pemberdayaan dan Layanan Sosial di Kalurahan yang Terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Meningkatnya Fasilitasi	Laporan Koordinasi Kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Perencanaan Partisipatif, Penguatan Kapasitas, dan Produktifitaas Ekonomi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Pemberdayaan Desa	Ekonomi Masyarakat (Laporan)	Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kapanewon			Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		
			Meningkatnya Fasilitasi Kentertiban, Keamanan Lingkungan, dan Ketangguhan Sosial di Masyarakat Desa dan Kalurahan		Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak). Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.

Berdasarkan tabel teknik perumusan program/kegiatan/subkegiatan selanjutnya dijabarkan ke dalam matrik pendanaan selama lima tahun dari tahun 2026-2030 bersama dengan target indikator outcome, indikator output, dan indikator kinerja sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di kapanewon wonosari	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0 000 - Kapanewon Wonosari	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Adat, Tradisi, Seni, dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				32.180.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				32.180.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya penyelenggaraan Keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan di kapanewon wonosari	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	32.180.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0 000 - Kapanewon Wonosari	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				32.180.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	2	2	32.180.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				32.180.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	2	2	32.180.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
7.01 - KECAMATAN				2.644.796.6 46		2.753.497.788, 15		2.784.177.429, 24		2.863.653.567, 46		2.875.687.39 3,2		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.624.081.2 46		1.703.002.516		1.788.457.641		1.685.318.288, 46		1.972.495.87 5		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	81,01	81,07	1.624.081.2 46	81,1	1.703.002.516	81,13	1.788.457.641	81,16	1.685.318.288, 46	81,19	1.972.495.87 5	7.01.0.00.0.00.01.0 000 - Kapanewon Wonosari	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.919.000		13.564.950		14.243.200		14.955.356		15.703.126		
Dokumen Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	12.919.000	17	13.564.950	17	14.243.200	17	14.955.356	17	15.703.126		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)													
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.050.000		4.252.500		4.465.125		4.688.381		4.922.800		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	4.050.000	2	4.252.500	2	4.465.125	2	4.688.381	2	4.922.800		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.445.000		1.517.250		1.593.113		1.672.768		1.756.407		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.445.000	1	1.517.250	1	1.593.113	1	1.672.768	1	1.756.407		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.615.000		1.695.750		1.780.538		1.869.564		1.963.043		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.615.000	1	1.695.750	1	1.780.538	1	1.869.564	1	1.963.043		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.525.000		1.601.250		1.681.313		1.765.378		1.853.647		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.525.000	1	1.601.250	1	1.681.313	1	1.765.378	1	1.853.647		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.159.000		1.216.950		1.277.798		1.341.687		1.408.772		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	1	1.159.000	1	1.216.950	1	1.277.798	1	1.341.687	1	1.408.772		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.509.000		2.634.450		2.766.173		2.904.481		3.049.705		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	17	17	2.509.000	17	2.634.450	17	2.766.173	17	2.904.481	17	3.049.705		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Realisasi Kinerja SKPD	SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				616.000		646.800		679.140		713.097		748.752		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	616.000	4	646.800	4	679.140	4	713.097	4	748.752		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.363.879.646		1.432.753.629		1.504.330.806		1.386.583.064,46		1.658.381.635		
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.363.879.646	1	1.432.753.629	1	1.504.330.806	1	1.386.583.064,46	1	1.658.381.635		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	266	266		266		266		266		266			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD (Laporan)	13	13		13		13		13		13			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.357.119.646		1.425.655.629		1.496.877.906		1.378.757.519,46		1.650.164.813		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	266	266	1.357.119.646	266	1.425.655.629	266	1.496.877.906	266	1.378.757.519,46	266	1.650.164.813		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.760.000		1.848.000		1.940.400		2.037.420		2.139.291		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.760.000	1	1.848.000	1	1.940.400	1	2.037.420	1	2.139.291		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000		5.250.000		5.512.500		5.788.125		6.077.531		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	13	13	5.000.000	13	5.250.000	13	5.512.500	13	5.788.125	13	6.077.531		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD (Laporan)														
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.100.000		1.210.000		1.331.000		1.464.100		1.610.510			
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12	1.100.000	12	1.210.000	12	1.331.000	12	1.464.100	12	1.610.510			
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.100.000		1.210.000		1.331.000		1.464.100		1.610.510			
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12	1.100.000	12	1.210.000	12	1.331.000	12	1.464.100	12	1.610.510			
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.683.632		6.100.000		6.710.000		7.381.000		8.119.100			
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	5.683.632	6	6.100.000	6	6.710.000	6	7.381.000	6	8.119.100			
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.683.632		6.100.000		6.710.000		7.381.000		8.119.100			
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	5.683.632	6	6.100.000	6	6.710.000	6	7.381.000	6	8.119.100			
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				36.932.400		37.519.020		39.394.971		41.364.720		43.432.956			
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	36.932.400	12	37.519.020	12	39.394.971	12	41.364.720	12	43.432.956			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12				12		12						
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4				4		4		4				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12				12		12		12				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12				12		12		12				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1				1		1		1				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12				12		12		12				
	7.01.01.2.06.0001 -						1.998.400				2.098.320				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	1.998.400	4	2.098.320	4	2.203.236	4	2.313.398	4	2.429.068		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.000.000		18.900.000		19.845.000		20.837.250		21.879.113		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	18.000.000	12	18.900.000	12	19.845.000	12	20.837.250	12	21.879.113		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.062.000		2.165.100		2.273.355		2.387.023		2.506.374		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	2.062.000	12	2.165.100	12	2.273.355	12	2.387.023	12	2.506.374		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.222.000		3.383.100		3.552.255		3.729.868		3.916.361		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	3.222.000	12	3.383.100	12	3.552.255	12	3.729.868	12	3.916.361		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	1.200.000	12	0	12	0	12	0	12	0		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				1.000.000		1.050.000		1.102.500		1.157.625		1.215.506		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.050.000	1	1.102.500	1	1.157.625	1	1.215.506		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9.450.000		9.922.500		10.418.625		10.939.556		11.486.534		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	9.450.000	12	9.922.500	12	10.418.625	12	10.939.556	12	11.486.534		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15.001.700		15.751.785		16.539.374		17.366.343		18.234.660		
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			15.001.700		15.751.785		16.539.374		17.366.343		18.234.660		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah														
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.001.700		15.751.785		16.539.374		17.366.343		18.234.660		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	15.001.700	1	15.751.785	1	16.539.374	1	17.366.343	1	18.234.660		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				135.204.868		141.965.132		149.063.390		156.516.559		164.342.386		
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	135.204.868	12	141.965.132	12	149.063.390	12	156.516.559	12	164.342.386		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48		48		48		48		48			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				340.000		357.000		374.850		393.593		413.272		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	340.000	4	357.000	4	374.850	4	393.593	4	413.272		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				43.199.868		45.359.882		47.627.877		50.009.270		52.509.734		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	43.199.868	48	45.359.882	48	47.627.877	48	50.009.270	48	52.509.734		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				91.665.000		96.248.250		101.060.663		106.113.696		111.419.380		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12	12	91.665.000	12	96.248.250	12	101.060.663	12	106.113.696	12	111.419.380		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kantor yang Disediakan (Laporan)													
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				53.360.000		54.138.000		56.844.900		59.687.146		62.671.502		
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	240	240	53.360.000	240	54.138.000	240	56.844.900	240	59.687.146	240	62.671.502		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	18				18				18			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1				1				1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.900.000		46.095.000		48.399.750		50.819.738		53.360.724		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	240	240	43.900.000	240	46.095.000	240	48.399.750	240	50.819.738	240	53.360.724		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.000.000		4.200.000		4.410.000		4.630.500		4.862.025		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	18	4.000.000	18	4.200.000	18	4.410.000	18	4.630.500	18	4.862.025		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.660.000		3.843.000		4.035.150		4.236.908		4.448.753		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	3.660.000	1	3.843.000	1	4.035.150	1	4.236.908	1	4.448.753		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi				1.800.000		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1.800.000	1	0	1	0	1	0	1	0		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.999.900		7.349.800		7.717.300		8.103.165		8.508.323		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	100	100	6.999.900	100	7.349.800	100	7.717.300	100	8.103.165	100	8.508.323	7.01.0.00.0.00.01.0 000 - Kapanewon Wonosari	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				6.999.900		7.349.800		7.717.300		8.103.165		8.508.323		
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	6.999.900	12	7.349.800	12	7.717.300	12	8.103.165	12	8.508.323		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6.999.900		7.349.800		7.717.300		8.103.165		8.508.323		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	6.999.900	12	7.349.800	12	7.717.300	12	8.103.165	12	8.508.323		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				95.418.800		100.189.740		105.199.228		110.459.187		115.982.148		
Meningkatnya Fasilitasi Kertertiban, Keamanan Lingkungan, dan Ketangguhan Sosial di Masyarakat Desa dan Kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	100	100	3.375.000	100	3.543.750	100	3.720.938	100	3.906.984	100	4.102.334	7.01.0.00.0.00.01.0 000 - Kapanewon Wonosari	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				3.375.000		3.543.750		3.720.938		3.906.984		4.102.334		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	70	70	3.375.000	70	3.543.750	70	3.720.938	70	3.906.984	70	4.102.334		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				3.375.000		3.543.750		3.720.938		3.906.984		4.102.334		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	70	70	3.375.000	70	3.543.750	70	3.720.938	70	3.906.984	70	4.102.334		
Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan dan Layanan Sosial di Masyarakat Kalurahan	Persentase fasilitas pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	89.123.800	100	93.579.990	100	98.258.990	100	103.171.938	100	108.330.536		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				48.700.000		51.135.000		53.691.750		56.376.338		59.195.154		
Laporan Kegiatan Pemberdayaan dan Layanan Sosial di Kalurahan yang Terfasilitasi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	17	17	48.700.000	17	51.135.000	17	53.691.750	17	56.376.338	17	59.195.154		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	15	15				15				15			
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				38.700.000		40.635.000		42.666.750		44.800.088		47.040.092		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	17	17	38.700.000	17	40.635.000	17	42.666.750	17	44.800.088	17	47.040.092		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.576.250		12.155.062		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	15	15	10.000.000	15	10.500.000	15	11.025.000	15	11.576.250	15	12.155.062		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				40.423.800		42.444.990		44.567.240		46.795.600		49.135.382		
Laporan Kegiatan Pemberdayaan dan Layanan Sosial di Kalurahan yang Terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	18	18	40.423.800	18	42.444.990	18	44.567.240	18	46.795.600	18	49.135.382		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				40.423.800		42.444.990		44.567.240		46.795.600		49.135.382		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	18	18	40.423.800	18	42.444.990	18	44.567.240	18	46.795.600	18	49.135.382		
Meningkatnya Fasilitas Perencanaan Partisipatif, Penguatan Kapasitas, dan Produktifitaas Ekonomi Dalam Permbdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Persentase desa/ kalurahan yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas dan pengembangan ekonomi masyarakat (%)	100	100	2.920.000	100	3.066.000	100	3.219.300	100	3.380.265	100	3.549.278		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.920.000		3.066.000		3.219.300		3.380.265		3.549.278		
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3	3	2.920.000	3	3.066.000	3	3.219.300	3	3.380.265	3	3.549.278		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2.920.000		3.066.000		3.219.300		3.380.265		3.549.278		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3	3	2.920.000	3	3.066.000	3	3.219.300	3	3.380.265	3	3.549.278		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				769.517.000		786.737.047,1 5		718.773.641,2 4		887.541.827		597.858.392, 2	7.01.0.00.0.00.01.0 000 - Kapanewon Wonosari	
Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	769.517.000	100	786.737.047,1 5	100	718.773.641,2 4	100	887.541.827	100	597.858.392, 2		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				769.517.000		786.737.047,1 5		718.773.641,2 4		887.541.827		597.858.392, 2		
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	16	769.517.000	16	786.737.047,1 5	16	718.773.641,2 4	16	887.541.827	16	597.858.392, 2		
7.01.04.2.01.0001 -				769.517.000		786.737.047,1		718.773.641,2		887.541.827		597.858.392,		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						5		4				2		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	16	16	769.517.000	16	786.737.047,1 5	16	718.773.641,2 4	16	887.541.827	16	597.858.392, 2		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				108.401.700		113.821.785		119.512.874		125.488.518		131.762.944		
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	108.401.700	100	113.821.785	100	119.512.874	100	125.488.518	100	131.762.944	7.01.0.00.0.00.01.0 000 - Kapanewon Wonosari	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				108.401.700		113.821.785		119.512.874		125.488.518		131.762.944		
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	108.401.700	4	113.821.785	4	119.512.874	4	125.488.518	4	131.762.944		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75		75		75		75		75			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka				99.970.000		104.968.500		110.216.925		115.727.771		121.514.160		
1945, Pelestarian Bhinneka														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	99.970.000	75	104.968.500	75	110.216.925	75	115.727.771	75	121.514.160		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8.431.700		8.853.285		9.295.949		9.760.747		10.248.784		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	8.431.700	4	8.853.285	4	9.295.949	4	9.760.747	4	10.248.784		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				40.378.000		42.396.900		44.516.745		46.742.582		49.079.711		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	40.378.000	100	42.396.900	100	44.516.745	100	46.742.582	100	49.079.711	7.01.0.00.0.00.01.0 000 - Kapanewon Wonosari	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				40.378.000		42.396.900		44.516.745		46.742.582		49.079.711		
Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	76	76	40.378.000	76	42.396.900	76	44.516.745	76	46.742.582	76	49.079.711		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	30	30		30		30		30					
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				3.500.000		3.675.000		3.858.750		4.051.688		4.254.272		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	4	4	3.500.000	4	3.675.000	4	3.858.750	4	4.051.688	4	4.254.272		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3.150.800		3.308.340		3.473.757		3.647.445		3.829.817		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	30	30	3.150.800	30	3.308.340	30	3.473.757	30	3.647.445	30	3.829.817		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17.485.000		18.359.250		19.277.213		20.241.073		21.253.127		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	76	76	17.485.000	76	18.359.250	76	19.277.213	76	20.241.073	76	21.253.127		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2.999.700		3.149.685		3.307.169		3.472.528		3.646.154		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	2.999.700	1	3.149.685	1	3.307.169	1	3.472.528	1	3.646.154		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi				7.530.000		7.906.500		8.301.825		8.716.916		9.152.762		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2	2	7.530.000	2	7.906.500	2	8.301.825	2	8.716.916	2	9.152.762		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				3.212.500		3.373.125		3.541.781		3.718.870		3.904.814		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	4	4	3.212.500	4	3.373.125	4	3.541.781	4	3.718.870	4	3.904.814		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2.500.000		2.625.000		2.756.250		2.894.062		3.038.765		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	2	2	2.500.000	2	2.625.000	2	2.756.250	2	2.894.062	2	3.038.765		

Dari tabel program kegiatan pendanaan dipilih program prioritas Kapanewon Wonosari untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Program prioritas yang merupakan program strategis oleh Kapanewon Wonosari sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kapanewon Wonosari				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga di kapanewon wonosari	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya penyelenggaraan Keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan di kapanewon wonosari	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan dan Layanan Sosial di Masyarakat Kalurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Fasilitasi Perencanaan Partisipatif, Penguatan Kapasitas, dan Produktifitas Ekonomi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Kalurahan		
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya Fasilitasi Kentertiban, Keamanan Lingkungan, dan Ketangguhan Sosial di Masyarakat Desa dan Kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Dalam dokumen Renstra Kapanewon Wonosari tidak secara eksplisit mencantumkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) karena IKK secara formal hanya terdpat dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) IKK merupakan bagian dari pelaporan kinerja yang dituangkan dalam LPPD sesuai peraturan perundang-undangan, dan kapanewon tidak termasuk didalamnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU RPJMD Kapanewon Wonosari merumuskan IKU sebagai berikut :

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Wonosari

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kapanewon Wonosari									
2.	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	93,82	96,78	96,88	96,98	97,08	97,18	97,28	
3.	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,38	83,88	84,38	84,88	85,38	85,88	86,38	
5.	Persentase Kegiatan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Wonosari Tahun 2025-2029 merupakan pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan. Strategi yang dipilih berupa kebijakan, program, dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2030. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Gunungkidul terpilih untuk pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Kapanewon Wonosari mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2025-2029. Rencana strategis ini disusun sebagai pedoman/acuan terhadap pelaksanaan dokumen Renja Kapanewon Wonosari.

Rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan utamanya di Kapanewon Wonosari dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya.

Plt. PANEWU,

SUSTIWININGSIH

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH